

© 2004 Soesilo Wibowo
Makalah Individu
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS 702)
Program Pascasarjana/S3, Institut Pertanian Bogor
Dosen :
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (Penanggung Jawab)
Prof, Dr. Ir. Zahrial Coto
Dr. Ir. Hardjanto

Posted: 30 December, 2004

PENGEMBANGAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA MENDUKUNG EKONOMI PERDESAAN DI INDONESIA

(Suatu Kajian Pengembangan Agropolitan di Kawasan Berbasis Peternakan,
Pertanian Tanaman Pangan, Sayuran, Buah-buahan dan Perkebunan)

Oleh:

Soesilo Wibowo

P062040131/PSL

soesilobgr@yahoo.com

Abstrak

Indonesia telah mengalami *krisis ekonomi* dan hampir semua sektor mengalami kontraksi perekonomian kecuali pertanian. Pemerintah berupaya memperkuat ekonomi fundamental dan sektor pertanian dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang utama, sehingga pemerintah melakukan *Pengembangan Agropolitan*.

Agropolitan (kota pertanian) berkembang karena berjalannya sistem agribisnis dan mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan agribisnis di wilayah sekitarnya. Pengembangan kawasan agropolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dengan *gerakan dan partisipasi aktif* petani, pengusaha dan masyarakat umum yang difasilitasi pemerintah.

Sebanyak 29 kabupaten/kota telah dikembangkan sebagai kawasan agropolitan dengan basis agribisnis peternakan, pertanian sayuran, buah-buahan, tanaman pangan, dan perkebunan. Program – program yang dilaksanakan oleh Deptan, Depdagri, DepKimpraswil, Depnakertrans, dan instansi terkait lainnya mencakup Pengembangan sistem usaha Agribisnis, Pengembangan sarana – prasarana kawasan, SDM, permodalan, kelembagaan dan usaha tani serta melaksanakan pekerjaan non fisik (Penyusunan Rencana Teknis) dan pekerjaan fisik pembangunan Prasarana-Sarana Kimpraswil (PSK) yang meliputi peningkatan jalan usahatani dan jalan poros, perbaikan pasar desa dan sub terminal agribisnis, pembangunan kios dan saluran pembawa air baku dll.

Berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, perekonomian agregat telah pulih pada tahun 2003, sedangkan subsektor pertanian pangan telah pulih sejak tahun 1999 ke level sebelum krisis, subsektor perkebunan tidak pernah mengalami kontraksi, subsektor peternakan pulih tahun 2002.

Program Pengembangan Agropolitan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian perdesaan sehingga sejak tahun 2003 Indonesia telah berada pada fase percepatan pertumbuhan ekonomi menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Kata Kunci : krisis ekonomi, agropolitan, gerakan dan partisipasi aktif, pertumbuhan ekonomi.

I. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

Indonesia dan juga negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Thailand, telah mengalami krisis moneter yang dimulai pada pertengahan tahun 1997. Krisis tersebut penyebabnya antara lain karena lemahnya fundamental perekonomian nasional (Nasution, 1999), sedangkan menurut Affendi Anwar (1999) diperkirakan karena :

- kepanikan para kreditor dan investor, terutama dari luar negeri
- faktor struktural ekonomi makro yang tidak stabil
- aspek fundamental ekonomi yang rapuh.

Selama kurun waktu 1997 – 1998, krisis ekonomi telah mengakibatkan kontraksi perekonomian Indonesia sebesar – 19 %, yaitu – 5 % pada tahun 1997 dan – 14 % tahun 1998. Kontraksi sebesar itu terutama menimpa sektor industri dan kontraksi yang cukup signifikan adalah properti (40 %), sektor perdagangan dan jasa (40 %) sektor manufacturing (terutama industri pengolahan 19 %), sedangkan sektor pertanian yang mengalami pengaruh *negatif multiplier effects* justru masih dapat tumbuh walaupun relatif sangat kecil. Besarnya kontraksi ekonomi pada sektor industri disebabkan karena sektor industri menggunakan komponen input-input yang diimpor dari luar negeri yang dibeli dengan dollar.

Krisis moneter tersebut di Indonesia berlanjut menjadi krisis ekonomi, kemudian krisis sosial dan politik yang bersifat multidimensional. Banyak buruh yang kehilangan pekerjaan (PHK) dan adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan salah arahnya kebijaksanaan pembangunan yang menyebabkan kemubaziran (*ineficiencies*). Hal yang paling mengesankan adalah rusaknya tatanan dan nilai-nilai adat (*social capital*) yang menyebabkan timbulnya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup karena ketidakmampuan masyarakat mengelolanya, masyarakat komunal menjadi perambah yang merusak sumberdaya alam.

Relatif tangguhnya sektor pertanian menurut Nasution (1999) antara lain disebabkan :

- Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam ketersediaan sumberdaya alam yang menjadi penyangga utama kegiatan sektor pertanian
- Secara institusional sektor pertanian yang relatif tradisional, terlindungi dari pengaruh eksternal yang merugikan karena terbatasnya kaitan (*linkage*) sektor tersebut dengan sektor manufaktur yang berorientasi ke luar negeri
- Sektor pertanian terdiri dari sangat banyak rumah tangga petani, perusahaan kecil menengah sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan internal
- Sumberdaya alam Indonesia sangat beragam diantara wilayah sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan antar wilayah yang ekstensif.

Sehubungan dengan membengkaknya hutang-hutang luar negeri yang selalu memberi tekanan kepada defisit neraca pembayaran kronis yang menimbulkan ketidak stabilan (*instability*) ekonomi makro, maka dicoba mencari jalan keluar terutama dalam rangka memperkuat ekonomi fundamental Indonesia dimasa datang yang lebih *efficient, equitable, dan sustainable*.

Berdasarkan sifat – sifat ketangguhan pada sektor pertanian tersebut maka diperkirakan sektor pertanian dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang utama dalam masa rehabilitasi, disamping adanya komitmen politik pemerintah untuk mengembangkan koperasi, perusahaan kecil menengah sebagai pelaku ekonomi utama dalam pembangunan nasional, sehingga pemerintah melaksanakan Program Pengembangan Agropolitan.

Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana penerapan konsep Agropolitan yang dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia kaitannya dengan basis agribisnis ? Apakah pengembangan

agropolitan dapat mendukung perekonomian perdesaan ? Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi daerah dalam rangka pengembangan agropolitan tersebut ?

1.1. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui :

- perkembangan kawasan Agropolitan di beberapa daerah kaitannya dengan basis agribisnis peternakan, pertanian tanaman pangan, sayuran, buah-buahan dan perkebunan
- perkembangan kawasan Agropolitan kaitannya dengan perekonomian perdesaan
- permasalahan –permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan agropolitan sehingga dapat memberikan masukan kepada perencana pembangunan dan pengambil keputusan untuk mewujudkan kawasan agropolitan yang berwawasan lingkungan.

II. PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

2.1. Konsep Agropolitan

Konsep pengembangan Agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh McDouglass dan Friedmann (1974) (Pasaribu, 1999) sebagai siasat untuk pengembangan perdesaan. Konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedmann adalah “kota di ladang”. Petani atau masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik pelayanan yang berhubungan dengan masalah produksi (teknik budidaya pertanian), kredit modal kerja dan pemasaran/ informasi pasar maupun masalah yang berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap hari. Pusat pelayanan diberikan pada setingkat desa, sehingga sangat dekat dengan pemukiman petani. Besarnya biaya produksi dan biaya pemasaran dapat diperkecil dengan meningkatkan faktor-faktor kemudahan pada kegiatan produksi dan pemasaran. Faktor-faktor tersebut menjadi optimal dengan adanya kegiatan pusat Agropolitan.

Peran Agropolitan adalah untuk melayani kawasan produksi pertanian di sekitarnya dimana berlangsung kegiatan agribisnis oleh para petani setempat. Fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk memberikan kemudahan produksi dan pemasaran berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik), serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi).

Dalam konsep Agropolitan juga diperkenalkan adanya *Agropolitan district* yaitu suatu daerah perdesaan dengan radius pelayanan 5 – 10 km, jumlah penduduknya 50 – 150 ribu jiwa dan kepadatan minimal 200 jiwa/km². Jasa-jasa dan pelayanan yang disediakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setempat. Agropolitan district perlu mempunyai otonomi lokal yang memberi tatanan terbentuknya pusat-pusat pelayanan di kawasan perdesaan yang dicirikan dengan adanya pasar-pasar untuk pelayanan masyarakat perdesaan yang volume permintaan dan penawarannya masih terbatas dan jenisnya berbeda-beda.

2.2. Deskripsi Kawasan Agropolitan.

Kata Agropolitan berasal dari kata *Agro* yang berarti *pertanian* dan *politian* yang berarti *kota* , sehingga Agropolitan adalah “ kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya “ .

Sedangkan pengertian Sistem Agribisnis yaitu “ pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam budidaya (*on farm*) tetapi juga meliputi pembangunan agribisnis hulu (penyedia sarana pertanian), agribisnis hilir (prosessing dan pemasaran hasil pertanian) dan jasa-jasa pendukungnya “. Inti dari sistem agribisnis adalah usaha agribisnis yang dilakukan oleh

masyarakat terutama petani dan pengusaha (swasta dan BUMN) baik pengusaha pelaku penyedia agroinput, pengolahan hasil, pemasaran maupun penyedia jasa.

Kawasan Agropolitan terdiri dari Kota Pertanian (Kota Menengah/Kota Kecamatan/ Kota Perdesaan) dan Desa-Desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah tetapi lebih ditentukan oleh skala ekonomi (satu kecamatan atau lintas kecamatan/kabupaten). Dengan demikian **Kawasan Agropolitan adalah “ Kawasan Agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan”**.

Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah “ pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah “.

Suatu Kawasan Agropolitan yang sudah berkembang memiliki ciri-ciri sbb:

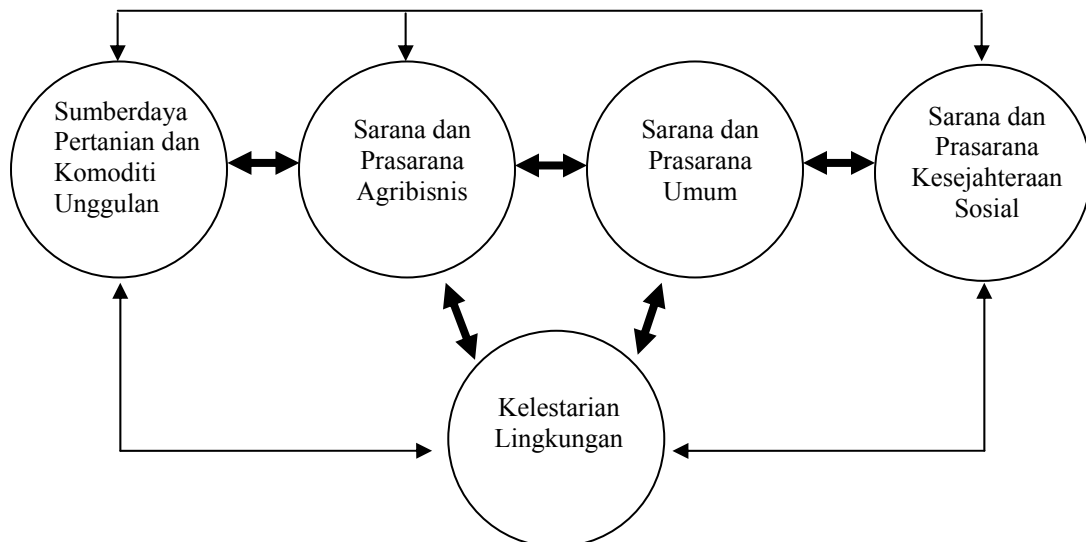
- Sebagian pendapatan masyarakat berasal dari pertanian (agribisnis)
- Kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian/agribisnis (ada komoditi unggulan), termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, perdagangan agribisnis hulu, agrowisata dan jasa pelayanan
- Hubungan kota dan desa di kawasan agropolitan bersifat interdependensi yang harmonis
- Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana desa modern.

2.3. Persyaratan Kawasan Agropolitan

Persyaratan wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan Agropolitan adalah :

- Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang dapat dipasarkan (memiliki komoditi unggulan)
- Memiliki sarana prasarana agribisnis yang memadai (pasar, lembaga keuangan, kelembagaan petani, Balai Penyuluhan Terpadu, kaji terap teknologi, aksesibilitas dan sarana pertanian)
- Memiliki sarana dan prasarana sosial yang memadai (Puskesmas, Sekolah dll)
- Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai (transportasi, listrik, telepon, air bersih)
- Kelestarian lingkungan yang terjamin.

Gambar 1 menunjukkan sistem Kawasan Agropolitan yang terdiri dari subsistem a). sumberdaya pertanian dan komoditi unggulan, b). sarana prasarana agribisnis, c). sarana prasarana umum, d). prasarana kesejahteraan sosial, dan e). kelestarian lingkungan.



Gambar 1. Sistem dalam Kawasan Agropolitan.

2.4. Tujuan dan Sasaran Program

Menurut Soenarno konsep agropolitan ini ditawarkan dalam rangka memberdayakan masyarakat tani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industri kecil, dan kerajinan rakyat serta pemanfaatan sumber daya alam secara holistik di perdesaan. Konsep ini sangat diyakini mampu mengurangi kemiskinan struktural, mendukung ketahanan pangan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang luas dan merata. Sebuah konsep dengan sasaran akhir tercapainya kawasan perdesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan lainnya, dengan memperhatikan hak, asal-usul dan adat-istiadat desa melalui pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan agropolitan menurut Anonim (2002) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

Sedangkan sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui :

- Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis
- Penguatan kelembagaan petani dan pengembangan kelembagaan sistem agribisnis
- Pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pembangunan Terpadu
- Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi.

2.5. Inti Program

Sesuai otonomi daerah, maka seluruh fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) pengembangan kawasan agropolitan dilakukan dan ditetapkan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah memfasilitasi gerakan dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Fasilitasi oleh Pemerintah mencakup beberapa kegiatan yaitu :

- Menyusun dan menyebarkan pedoman-pedoman /petunjuk teknis/petunjuk praktis
- Melakukan sosialisasi dan Pelatihan
- Membantu mewujudkan program masyarakat (jangka menengah/program tahunan)
- Membantu melaksanakan identifikasi
- Membantu melaksanakan program sesuai dengan program yang disusun masyarakat
- Membantu memecahkan masalah
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan.

Indikator keberhasilan program pengembangan kawasan agropolitan, yang disesuaikan dengan kondisi daerah, dapat dilihat dari dampak dan output yang dihasilkan sebagai berikut :

a. Dampak : - Pendapatan masyarakat meningkat minimal 5%

- Produktivitas meningkat minimal 5%

- Investasi masyarakat meningkat minimal 10%

b. Output : - Program jangka panjang 70% dapat dilaksanakan

- 80% kelembagaan tani mampu menyusun usaha yang berorientasi pasar dan lingkungan
- menyusun perencanaan partisipatif dan disetujui bersama pelaksanaannya
- Jaringan bisnis petani terbentuk dan aktif
- Tim penyuluh multi disiplin dan profesional terbentuk dan operasional
- 80% kontak tani/petani maju mampu menjadi tempat belajar bagi petani sekitarnya.

Program pengembangan kawasan agropolitan meliputi beberapa fase kegiatan yaitu :

- Fase Pengenalan : sosialisasi di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten dan di Kawasan Agropolitan
- Fase Persiapan : pelatihan dan persiapan (perencanaan dan pengorganisasian)
- Fase Penyusunan Program : musyawarah desa/kawasan agropolitan dengan output dari musyawarah yaitu Program kesepakatan (program masyarakat)

- Fase Pelaksanaan : pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah disepakati bersama.

2.6. Lokasi Agropolitan.

Basis pertanian yang dijadikan andalan program ini akan menyentuh subsektor *Tanaman Pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan* dan *perikanan*, sehingga lokasinya dipilih berdasarkan adanya komoditas unggulan. Pada tahun 2002 pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan di 8 kabupaten seperti terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Basis Agribisnisnya Tahun 2002.

No.	Kabupaten/Propinsi	Basis Agribisnis
1	Agam , Sumatera Barat	Ternak sapi
2	Barru, Sulawesi Selatan	Ternak sapi
3	Rejang Lebong, Bengkulu	Jagung dan sayuran
4	Cianjur, Jawa Barat	Sayuran dan bunga2an
5	Bualemo, Gorontalo	Jagung
6	Kutai Timur, Kalimantan Timur	Jagung dan coklat
7	Kulon Progro, DI Yogyakarta	Biofarmaka
8	Bangli, Bali	Kopi dan jeruk

<http://www.deptan.go.id/agropolitan/lokasi-2.html>. Dikunjungi 16 Desember 2004.

Sedangkan pada tahun 2003 direncanakan Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan di 21 Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat pada tabel 2.

Tabel 2. Lokasi Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Basis Agribisnisnya Tahun 2003.

No.	Kabupaten/Propinsi	Basis Agribisnis
1	Aceh Besar, NAD Aceh	Ternak sapi
2	Kuningan, Jawa Barat	Ternak Sapi
3	Dompu, NTB	Ternak Sapi
4	Kupang, NTT	Ternak Sapi
5	Kapuas, Kalimantan Tengah	Ternak Sapi
6	Kendari, Sulawesi Tenggara	Ternak Sapi
7	Tanjung Jabung Timur, Jambi	Kedele dan Sapi Potong
8	Semarang, Pemalang , Jawa Tengah	Tanaman Hias, Sapi dan Farmaka
9	Donggala, Sulawesi Tengah	Kakao, sapi, ikan
10	Tabanan, Bali	Peternakan
11	Karo, Deli Serdang , Sumatera Utara	Sayuran, buah-buahan
12	Kabupaten Lampung Tengah, Lampung	Padi, Jagung dan Kedele
13	OKU, OKI, Sumatera Selatan	Padi dan Hortikultura
14	Mojokerto, Banyuwangi, Jawa Timur	Palawija
15	Minahasa , Sulawesi Utara	Kentang, wortel, sayuran
16	Indragiri Hilir, Riau	Padi dan Kelapa
17	Pandeglang, Banten	Durian dan Palawija
18	Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	Jeruk , sayuran
19	Belitung, Bangka Belitung	Manggis dan lada
20	Pontianak, Kalimantan Barat	Lidah buaya, sayuran, papaya
21	Jayapura, Papua	Kakao

<http://www.deptan.go.id/agropolitan/lokasi-3.html>. Dikunjungi 16 Desember 2004.

III. PERANAN LINTAS SEKTORAL DALAM PENGEMBANGAN AGROPOLITAN

3.1. Departemen Kimpraswil

Dari aspek struktur sektoral “kawasan” secara teknis menjadi tanggung jawab dan di bawah pembinaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Mengingat letak dan tempatnya di “desa”, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah melibatkan 2 (dua) Direktorat Jenderal sekaligus yaitu Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan serta

Direktorat Jenderal Sumberdaya Air. Sedangkan basis ‘pertanian’ yang dijadikan andalan program ini, tentu melibatkan Departemen Pertanian.

Menurut Anonim (2002) pengembangan perdesaan melalui pendekatan *agro based development* perlu terus ditingkatkan karena diyakini dapat memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Desa –desa yang ditumbuh kembangkan terutama yang mempunyai produk unggulan dan image bahwa desa hanya sebagai pemasok hasil produksi pertanian perlu dihilangkan dengan didorong menjadi desa yang mampu menghasilkan bahan-bahan olahan (industri hasil pertanian) sehingga desa dapat menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan perdesaan dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa–kota (*Urban-rural linkage*) dan hubungannya bersifat interdependensi yang dinamis.

Menurut Anonim (2003) di Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) atau sentra produksi pertanian masih kurang prasarana dan sarana produksi, pemasaran dan lingkungan perumahan serta permukiman. Dukungan Departemen Kimpraswil adalah dalam aspek produktivitas, pemasaran, lingkungan permukiman. Strategi yang diterapkan adalah strategi bantuan teknis dan dukungan Prasarana dan Sarana bidang Kimpraswil (PSK) yang meliputi :

- penyiapan master plan kawasan agropolitan termasuk rencana prasarana dan sarana
- pemenuhan kebutuhan air baku (pertanian, peternakan dan tambak), jalan usahatani dan pergudangan
- peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk dalam kawasan (Pasar,TPI, terminal DPP) dan ke luar kawasan (Akses menuju jalan primer)
- peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman (kebutuhan air bersih, sanitasi, perbaikan perumahan, jalan lingkungan perumahan dan fasos serta fasum).

Pada tahun 2002, dana yang disediakan untuk pengembangan kawasan agropolitan di 8 kabupaten mencapai Rp. 6,1 milyar, sedangkan pada tahun 2003 telah disediakan Rp. 1,5 milyar untuk setiap kawasan dengan total kawasan mencapai 29 kabupaten/kota. Sebagai upaya untuk mewujudkan “ **Sinkronisasi Program antara Pusat – Daerah** ” dalam pengembangan kawasan Agropolitan telah disepakati adanya kontribusi pendanaan (*Fund Sharing*), yang mengacu pada Ketetapan Menteri Pertanian, dimana dari seluruh biaya program agropolitan pada satu kawasan tertentu komposisi pendanaannya sebagai berikut :

- (a) Pemerintah Pusat, mendanai 10% - 20 %;
- (b) Pemerintah Provinsi, mendanai 21% - 40%;
- (c) Pemerintah Kabupaten, mendanai 41% - 60%.

3.2. Departemen Depdagri

Dukungan Depdagri melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pengembangan Kawasan Agropolitan tidak spesifik, namun dilakukan dengan Pembangunan Perdesaan yang menggunakan 2 pendekatan yaitu :

- pembangunan kawasan/wilayah (*Spatial development*) dan
- pembangunan perdesaan sebagai bagian dari pendekatan pembangunan masyarakat (*Community development*).

3.2.1. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (*Community Empowerment for Rural Development*) (CERD).

Menurut Anonim (2002) program ini bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan terutama yang hidup dibawah garis kemiskinan melalui :

- Penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa dengan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan partisipasi masyarakat
- Pengembangan lembaga keuangan desa dengan kegiatan:

- pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, kelompok usaha simpan pinjam
- peningkatan kemampuan teknis pengusaha kecil
- pembentukan dan pengembangan wirausaha baru
- pengembangan kemampuan pemasaran produk usaha ekonomi masyarakat
- pembentukan jaringan kerja antar lembaga ekonomi masyarakat.
- Pembangunan prasarana desa dengan kegiatan :
 - identifikasi kebutuhan prasarana pendukung usaha ekonomi
 - pembuatan rencana teknis
 - pembentukan dan pengembangan wirausaha baru
 - pembangunan serta pemeliharaan

3.2.2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program yang digulirkan mulai tahun 1989 sangat membantu dalam pengembangan kelembagaan pembangunan di daerah dan peningkatan kinerja pengelolaan pembangunan program penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya melalui dua mekanisme yaitu :

- daerah menyediakan komponen dana pembinaan dan administrasi proyek atau
- daerah memberikan kontribusi dalam bentuk dana pembinaan dan administrasi proyek serta dana bantuan langsung masyarakat.

Pendekatan Program PPK adalah pemberdayaan masyarakat sesuai azas : ***Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM)*** melalui keberpihakan kepada yang miskin, Otonomi dan Desentralisasi, Partisipasi, Keswadayaan dan Keterpaduan.

3.2.3. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Lumbung pangan masyarakat berperan sebagai pusat aktivitas kegiatan pelayanan kebutuhan kelompok usaha ekonomi masyarakat/kelompok tani berwawasan agribisnis pangan dan diharapkan dapat menarik, mendorong, dan menghela kelompok-kelompok usaha ekonomi di wilayah sekitarnya dalam kegiatan penyimpanan, pengolahan pendistribusian dan pemasaran dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat di perdesaan.

Program ini diharapkan terintegrasi dengan program yang direalisasikan departemen terkait yaitu Departemen Kimpraswil, Sosial, Kesehatan, Kantor MenKop dan Pengusaha Kecil.

3.2.4. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Kegiatan UED-SP yang mulai dilaksanakan tahun 1995/1996 dimaksudkan untuk mencari model dan pola operasional yang baik untuk dikembangkan di daerah lainnya . Pembinaan usaha ekonomi rakyat diutamakan pada pengembangan kewiraswastaan penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan serta permodalan melalui ***Dana Pembangunan Desa (DPD)*** agar dapat meningkatkan usahanya. Dana modal usaha tersebut harus dikembalikan oleh masyarakat penerima sesuai jadwal yang telah disepakati dan selanjutnya digunakan oleh anggota masyarakat lainnya yang memerlukannya.

3.2.5. Program Pasar Desa.

Pembentukan, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa bertujuan untuk meningkatkan salah satu sumber PAD, memasarkan hasil produksi desa, mendorong masyarakat agar mampu memproduksi , mengolah hasil pertanian dan memasarkannya, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mendorong kehidupan Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi Unit Desa.

3.3. Departemen Pertanian.

Pembangunan pertanian tahun 2000-2004 dilaksanakan melalui Program Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Ketahanan Pangan yang bertujuan menciptakan peluang,

memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis dan peningkatan serta keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Operasionalisasi pembangunan pertanian di kawasan dilakukan melalui pengembangan kawasan agribisnis yang ditetapkan sesuai keunggulan komoditas komersial (selain padi) di masing-masing daerah. (Anonim, 2004)

Pembangunan agribisnis yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah yang bersifat multidimensi perlu di dukung oleh keterlibatan secara penuh masyarakat tani, pengusaha dan pemerintah. Ditinjau dari sudut pandang sumberdaya manusia maka diperlukan upaya –upaya :

- peningkatan kemampuan atau produktivitas sumberdaya manusia
- peningkatan kemampuan organisasi ekonomi masyarakat kawasan
- peningkatan iklim yang dapat mendorong berkembangnya agribisnis.

Iklim yang dapat mendorong berkembangnya agribisnis yaitu :

- perbaikan, penataan dan perluasan infrastruktur fisik (sistem irigasi, farm road, transportasi ke kawasan, sentra produksi dengan pusat-pusat pelayanan)
- pengelolaan pasar out put dan input
- permukiman dan
- pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempertahankan kelestariannya.

Semua upaya - upaya tersebut perlu dilakukan secara koordinatif, sinergis, dan berkelanjutan agar tercapai percepatan kawasan agropolitan.

3.4. Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi.

Menurut Anonim (2002), Model Pembangunan Kawasan Transmigrasi, yang di masa lalu menerapkan konsep pengembangan dalam satuan kawasan , Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Banyak pemukiman yang kurang memiliki kemampuan untuk tumbuh, sehingga salah satu tujuan Depnakertrans adalah berusaha mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan yang ada maupun yang baru. Kebijakan PIR-Trans mewujudkan pengembangan kawasan dengan pendekatan agribisnis dapat memperlihatkan keberhasilan dalam waktu relatif singkat.

Kebijakan lainnya adalah Operasional Kawasan Transmigrasi Gabungan hamparan lahan dalam kawasan budidaya yang meliputi :

- Desa-desa eks UPT trans (PTD), unit Permukiman Transmigrasi yang Ada (PTA), areal-areal yang potensial untuk mengembangkan UPT Baru (PTB) dan permukiman penduduk/desa setempat
- Berpotensi untuk pengembangan satu atau lebih komoditas unggulan dalam satu kesatuan sistem bisnis hulu hilir yang memenuhi skala ekonomi
- Memiliki sentra fasilitas pelayanan/jasa sosial dan ekonomi
- Memiliki satu kesatuan jaringan infrastruktur yang tersimpul pada sentra yang ada.

IV. PERFORMANSI DAERAH PENGEMBANGAN AGROPOLITAN

Untuk mengkaji daerah pengembangan agropolitan dapat didekati dengan basis agribisnis yang dikembangkan yaitu peternakan (sapi), pertanian pangan (padi dan palawija), pertanian hortikultura (sayuran dan buah-buahan), perkebunan (lidah buaya, kakao, karet, biofarmaka).

Pemilihan daerah kajian pengembangan agropolitan dilakukan secara disengaja (*Purposive sampling*) sebagai berikut :

- kawasan berbasis agribisnis sapi dipilih Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan
- kawasan berbasis agribisnis palawija dipilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
- kawasan berbasis agribisnis buah-buahan dipilih Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
- kawasan berbasis agribisnis sayuran dipilih Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

- kawasan berbasis agribisnis perkebunan dipilih Kabupaten Belitung, Bangka Belitung.
Kajian dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu dengan mengamati dan mempelajari program dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan agropolitan untuk selanjutnya dilakukan penghitungan, kompilasi dan penyimpulan.

4.1. Kawasan Agropolitan Berbasis Agribisnis Sapi.

Kawasan Agropolitan dengan luas areal 19.932 ha, sentra produksinya terletak di **Desa Tuwung**, Kabupaten Barru dengan luas persawahan 3.840 ha, tambak 607,71 ha dan lahan kering 1.457 ha. Keadaan topografi kawasan bervariasi mulai dari datar, bergelombang, berbukit dengan kemiringan 0 - > 40%, dan beriklim basah dan kering. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani (70%) dan sisanya pedagang, tukang, PNS, dan TNI/Polri.

Perekonomian penduduk beraktifitas pada jual beli hasil peternakan **sapi** yang didominasi pedagang pengumpul lokal yang sangat merugikan petani karena petani berada pada posisi tawar yang lemah. Petani juga mengusahakan tanaman jagung dan padi varietas unggul aromatik .

Program – program pengembangan kawasan agropolitan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan sistem usaha Agribisnis hulu, Usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan jasa penunjang
- b. Pengembangan sarana – prasarana kawasan, SDM, pemodalan, kelembagaan dan usaha tani
- c. Melaksanakan pekerjaan non fisik dan fisik pembangunan Prasarana-Sarana Kimpraswil (PSK) yang meliputi :
 - Penyusunan Rencana Teknis :
 - Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan
 - Identifikasi kebutuhan PSK untuk mendukung Kawasan Agropolitan
 - Penyusunan DED Kawasan Agropolitan TA. 2003
 - Pekerjaan Fisik : yaitu peningkatan jalan usahatani 9.159 meter.

4.2. Kawasan Agropolitan Berbasis Agribisnis Palawija

Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di Rantau Rasau, dengan areal terdiri dari hutan suaka alam dan areal produksi tetap 343.675 ha, tanaman pangan lahan basah dan kering serta palawija 48.370 ha, perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit, kopi dan lada seluas 65.462 ha dan sisanya perkampungan. Keadaan topografi kawasan relatif datar dengan tingkat kemiringan lereng 0 - 8%, ketinggian antara 0 - 10 m dpl karena pengaruh pasang surut sehingga potensi erosi cukup besar, yaitu sekitar 8.695 ha dari luas wilayah kecamatan, sedangkan sisanya merupakan tanah yang sedang, subur dan sangat subur.

Penduduk kawasan pada tahun 2002 adalah 30.357 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,2% per tahun dengan mata pencaharian dominan sebagai petani (74,71%) dan sisanya PNS, karyawan perusahaan, TNI/Polri dan lain-lain.

Sistem jaringan jalan kawasan agropolitan berpola linier yang dikelilingi areal pertanian. Perekonomian penduduk beraktifitas pada kegiatan jual beli hasil pertanian yang didominasi pembeli (pengusaha) yang mempunyai akses transportasi, sedangkan petani masih kurang berkembang, sehingga belum memberi nilai tambah. Komoditas yang diusahakan adalah **kedelai**, **jagung** dan beternak sapi. Kendalanya adalah pemasaran karena kuantitas dan kualitas produknya jelek serta jarak ke kota sangat jauh sehingga hasil pertanian dijual dengan harga sangat rendah. Daerah pemasarannya adalah Kota Muaro, Kota Jambi

Program – program pengembangan kawasan agropolitan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan sistem usaha Agribisnis hulu, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan jasa penunjang
- b. Pengembangan sarana – prasarana kawasan, SDM, permodalan, kelembagaan dan usaha tani

- c. Melaksanakan pekerjaan non fisik dan fisik pembangunan Prasarana-Sarana Kimpraswil (PSK) yang meliputi :
- Penyusunan Rencana Teknis :
 - Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan
 - Identifikasi kebutuhan PSK untuk mendukung Kawasan Agropolitan
 - Penyusunan DED Kawasan Agropolitan TA. 2003.
 - Pekerjaan Fisik :
 - Peningkatan jalan ke Subterminal Agrobisnis (Lapen) 3,750 m
 - Peningkatan pasar desa 1 unit

4.3. Kawasan Agropolitan Berbasis Agribisnis Buah-buahan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur menetapkan program **Gerakan Daerah Membangun Agribisnis (GERDABANGAGRI)** sebagai motor penggerak pengembangan Agribisnis, yang mampu mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis/ agroindustri. Strategi kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten yaitu :

- menetapkan dan mengembangkan kawasan Agropolitan **SANGSAKA**, yaitu Sangkulirang yang mencakup Kecamatan Sandarang dengan Maloy sebagai pusat pertumbuhan agribisnis/agroindustri komoditas *pisang, manggis, rambutan, jeruk*, kakao, kambing, sapi.
- melakukan Zonasi (perwilayahan) komoditas di Kutai Timur dan menetapkan wilayah-wilayah pengembangan lain yang berfungsi sebagai satelit pertumbuhan dari Agropolitan SANGSAKA atau pusat pertumbuhan Agribisnis orde kedua
- Mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti transportasi, komunikasi, air bersih dan energi bagi pengembangan kawasan Agropolitan maupun pengembangan agribisnis di wilayah hinterland.

Dua Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian adalah sebagai berikut :

- **Keberadaan Kawasan Lindung**, yakni kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan karakteristik alamnya sebagai kawasan yang memberikan perlindungan bagi alam secara ekologis.
- **Keberadaan Kuasa Pertambangan dan Konsesi HPH yang aktif**. Konsesi biasanya memiliki jangka waktu yang panjang, sehingga tidak semua kegiatan budidaya pertanian yang sesuai lahannya dapat dilaksanakan pada lahan yang konsesinya dikuasai oleh pihak tertentu.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus melakukan verifikasi dan penataan kembali kawasan HPH maupun HTI, walaupun hal ini memerlukan waktu dan melibatkan banyak pihak terkait. Kemungkinan dan peluang sangat terbuka untuk mengkonversi kawasan hutan produksi menjadi kawasan budidaya pertanian.

Agropolitan SANGSAKA dan Kawasan Agroindustry Maloy ditetapkan sebagai suatu program karena :

- Luas wilayah Sangsaka mencukupi sebagai pengembangan kawasan agropolitan, berdasarkan luasan Wilayah Pengembangan Partial (1 WPP = 25.000 ha)
- Telah ada pelabuhan samudra, dengan kapasitas bongkar muat 7.000 ton
- Dapat menjadi pelabuhan transit untuk kawasan Indonesia Timur
- Telah ada jalan arteri (trans Kalimantan) penghubung Sangatta – Samarinda - Balikpapan
- Curah hujan merata sepanjang tahun sekitar 25.000 mm / tahun
- Jumlah populasi penduduk SangSaKa sekitar 300.000 jiwa

- Kondisi agroklimat sangat sesuai untuk pengembangan komoditas agribisnis pisang, manggis, rambutan, jeruk, kakao, kambing dan sapi. Khusus komoditas pisang terkenal dengan “ Pisang Kepok ”
- Tersedianya fasilitas sarana-prasarana dan angkutan pedesaan yang terus ditingkatkan
- Tersedianya perincian dasar (RDTR, RTBL) Maloy
- Adanya embrio P3AK
- Adanya embrio agropolitan yang dipelopori oleh Koperasi Masyarakat Agribisnis (**KOMAGRI**) dan Pembentukan Koperasi Unggul di kecamatan
- Adanya penerapan pola perkembangan perkebunan yang khas di Kutai Timur dan Maloy
- Pendirian balai GERDABANGAGRI di Maloy Kabupaten Kutai Timur
- SP2AB, Dai Pembangunan, PPL, Petani inti dan kader koperasi
- Maloy telah disetujui sebagai salah satu kawasan tumbuh di Kalimantan Timur .

Perekonomian penduduk beraktifitas pada kegiatan jual beli hasil pertanian yang didominasi pembeli (tengkulak) yang datang langsung kelokasi pertanian untuk membeli hasil pertanian, karena pengembangan jaringan jalan akses ke pasar masih terisolir. Hal ini sangat merugikan petani karena harga jual hasil pertanian menjadi sangat rendah. Hasil pertaniannya selain dijual di daerah sekitar juga dibawa ke Jawa Timur, Makassar dan Bali.

Program – program pengembangan kawasan agropolitan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan sistem usaha Agribisnis hulu, Usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan jasa penunjang
- b. Pengembangan sarana –prasarana kawasan, SDM, permodalan, kelembagaan dan usaha tani
- c. Melaksanakan pekerjaan non fisik dan fisik pembangunan Prasarana-Sarana Kimpraswil:
 - Penyusunan Rencana Teknis :
 - Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan
 - Identifikasi kebutuhan PSK untuk mendukung Kawasan Agropolitan
 - Penyusunan DED Kawasan Agropolitan TA. 2003
 - Pekerjaan Fisik :
 - Peningkatan jalan poros desa (Lapen) 7.000 m
 - Peningkatan jalan usaha tani 2.342 m.

4.4. Kawasan Agropolitan Berbasis Agribisnis Tanaman Sayuran.

Kawasan Agropolitan Kabupaten Cianjur adalah di Pacet yang luasnya 5.476 ha yang terdiri dari areal pertanian 3.594 ha dan 1.882 terdiri dari permukiman, jalan, sungai, dan hutan lindung. Jumlah penduduknya pada tahun 2000 adalah 169.731 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 6,65% per tahun. Keadaan topografi kawasan adalah berbukit dan pegunungan dengan ketinggian 800 - 1400 m dpl, dengan iklim basah 9 bulan dan kering 3 bulan dengan suhu rata-rata 18-20° C.

Mata pencaharian penduduk adalah 29.332 jiwa buruh lepas, 11.526 jiwa buruh tani, sisanya adalah PNS, ABRI, Pensiunan dan Karyawan perusahaan. Komoditas yang diusahakan adalah sayuran terutama *wortel* dan *bawang daun* yang dibawa ke Cipanas, Bogor dan Jakarta.

Program – program pengembangan kawasan agropolitan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan sistem usaha Agribisnis hulu, Usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan jasa penunjang
- b. Pengembangan sarana – prasarana kawasan, SDM, permodalan, kelembagaan dan usaha tani
- c. Melaksanakan pekerjaan non fisik dan fisik pembangunan Prasarana-Sarana Kimpraswil:
 - Penyusunan Rencana Teknis :
 - Identifikasi kebutuhan PSK untuk mendukung Kawasan Agropolitan
 - Penyusunan DED Kawasan Agropolitan TA. 2003
 - Pekerjaan Fisik :
 - Saluran pembawa airbaku PVC diameter 150 mm sepanjang 2.000 m
 - Peningkatan jalan usaha tani 3.500 m.

4.5. Kawasan Agropolitan Berbasis Agribisnis Tanaman Perkebunan.

Kawasan Agropolitan di Kabupaten Belitung dengan ibukota Tanjung Pandan merupakan kabupaten kepulauan, pemekaran dari Propinsi Sumatera Selatan dengan berbagai potensi sumberdaya alam seperti tambang timah, pasir kuarsa, bangunan dan tanah liat. Penduduk kabupaten mencapai 204.776 jiwa pada tahun 2000 yang menempati wilayah daratan seluas 4.800 km² dan lautan seluas 29.606 km². Mata pencaharian penduduk adalah perkebunan dan pertanian serta perikanan.

Hasil perkebunan yang merupakan komoditi unggulan adalah *lada* dan *kelapa sawit* disamping manggis dan perikanan yang memberikan andil perekonomian kabupaten pada tahun 2000, karena telah menggeser dominasi sektor industri. Hasil pertaniannya biasanya dibawa ke Jakarta, Palembang, Pangkal Pinang dan sekitarnya

Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah pariwisata pantai. Jaringan jalan raya sepanjang kurang lebih seribu kilometer merupakan salah satu fasilitas penunjang untuk menghubungkan satu daerah dengan yang lainnya dan juga ditunjang oleh ketersediaan 5 pelabuhan lokal dan 1 pelabuhan dalam proses pembangunan serta bandar udara Hanandjoeddin.

Program – program pengembangan kawasan agropolitan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan sistem usaha Agribisnis hulu, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan jasa penunjang
- b. Pengembangan sarana – prasarana kawasan, kelembagaan dan usaha tani
- c. Melaksanakan pekerjaan non fisik dan fisik pembangunan Prasarana-Sarana Kimpraswil (PSK) yang meliputi :
 - Penyusunan Rencana Teknis :
 - Identifikasi kebutuhan PSK untuk mendukung Kawasan Agropolitan
 - Pekerjaan Fisik :
 - Peningkatan jalan poros (Lapen) 4.025 m.

V.HASIL-HASIL PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN.

5.1.Sumbangan terhadap Perekonomian Nasional

Menurut Anonim (2004), berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, perekonomian agregat baru pulih pada tahun 2003, sedangkan subsektor pertanian pangan telah pulih sejak tahun 1999 ke level sebelum krisis, subsektor perkebunan tidak pernah mengalami kontraksi, subsektor peternakan pulih tahun 2002. Kepulihan pertumbuhan rata-rata subsektor perkebunan dan pertanian pangan, laju pertumbuhannya jauh lebih tinggi dari periode sebelum krisis. Laju pertumbuhan subsektor tanaman pangan meningkat dari 0,13 % sebelum krisis, periode 1993 –1997, menjadi 0,52 % pada periode 2000-2003, subsektor perkebunan meningkat dari 4,3 % sebelum krisis, menjadi 5,02 % , sementara laju pertumbuhan subsektor peternakan masih belum pulih ke level sebelum krisis.

Dibanding sebelum krisis, selama periode 2000-2003, hampir semua produksi komoditas pertanian mengalami peningkatan, kemiskinan di pedesaan menurun konsisten, kesejahteraan petani meningkat, ketahanan pangan semakin mantap, kesempatan kerja sektor pertanian meningkat dan sumbangan sektor pertanian terhadap penerimaan devisa bertambah. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti sehingga sejak tahun 2003 Indonesia telah berada pada fase percepatan pertumbuhan menuju pertumbuhan berkelanjutan.

5.2. Sumbangan Terhadap Perekonomian Perdesaan.

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan telah meningkatkan kinerja perekonomian perdesaan terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- diterapkannya teknologi tepat guna/teknologi baru dapat meningkatkan hasil, misalnya : bokashi, pertanian organik, penggunaan varietas unggul dll.
- dilakukannya kegiatan bimbingan pengolahan hasil pertanian mendorong industrialisasi perdesaan
- banyaknya kegiatan pembangunan fisik menyebabkan terbukanya lapangan kerja baru
- tersedia dan berfungsinya sarana - prasarana dasar menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi , misalnya :
 - Balai Penyuluhan Pertanian, Kantor Koperasi, Pasar/sub terminal agribisnis yang melakukan aktivitas setiap hari sehingga memungkinkan terlayannya kebutuhan petani.
 - Jalan yang tersedia, baik farm road ataupun jalan menuju pusat pertumbuhan memungkinkan terjadinya transportasi input, alat-alat pertanian dan produk-produk pertanian, sehingga meningkatkan pendapatan petani karena transportation cost berkurang
 - Berkembangnya wisata/ekowisata/agrowisata
- meningkatnya peran serta petani dalam investasi usaha menyebabkan terhimpunnya modal usaha diantara petani dan kelompok tani disamping terjalinnya kemitraan antara petani dengan pengusaha dan koperasi.

5.3. Permasalahan .

- Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan agropolitan yaitu :
- prasarana transportasi masih ada yang belum memadai
 - sarana/tempat pengumpulan, pengolahan industri, gudang penyimpanan hasil masih kurang
 - sarana kesehatan lingkungan (Air bersih, drainase dan persampahan) masih kurang
 - sarana air baku masih kurang dan sarana produksi pertanian masih ada yang tersedia di luar kawasan agropolitan
 - pasar/pasar ternak/subterminal agribisnis masih kurang dan pemasaran hasil masih didominasi tengkulak dengan sistem ijon, borongan sehingga merugikan petani
 - fasilitas sosial dan umum (penerangan listrik dan telpon) masih terbatas
 - bertambahnya perumahan-perumahan baru dapat meningkatkan konversi lahan pertanian
 - teknologi baru yang akan dikembangkan masih ada yang sulit diterima petani (drip dan sprinkle irrigation)
 - masih ada petani yang bersifat subsistence, yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri
 - masih banyak kelompok tani yang belum berfugsi sebagai kelembagaan usaha

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini adalah :

1. Pemerintah dalam upaya memperkuat ekonomi perdesaan telah melaksanakan program pengembangan agropolitan dan rintisan kawasan agropolitan di 29 daerah/kota dengan basis agribisnis peternakan, pertanian pangan, sayuran, buah-buahan dan perkebunan.
2. Pelaksanaan program agropolitan melibatkan lintas sektoral secara terpadu dengan sistem pendanaan “Fund sharing “ antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah
3. Program – program pengembangan kawasan agropolitan yang dilaksanakan meliputi pengembangan sistem usaha Agribisnis, pengembangan sarana –prasarana kawasan, SDM, pemodal, kelembagaan dan usaha tani serta pelaksanaan pekerjaan non fisik (Penyusunan Rencana Teknis) dan fisik pembangunan Prasarana-Sarana Kimpraswil (PSK).
4. Program pengembangan agropolitan telah menyumbang terhadap perekonomian nasional dimana perekonomian agregat telah dapat pulih pada tahun 2003.
5. Program pengembangan kawasan agropolitan juga telah mendorong berkembangnya perekonomian di perdesaan.

6.2. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam rangka pengembangan agropolitan yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Sebagian kawasan agropolitan berada di daerah pegunungan sehingga sangat perlu menjaga kelestarian lingkungan dengan cara-cara :
 - Membuat peraturan daerah
 - Menanami komoditas yang mendukung kelestarian DAS dan tebing
 - Pengembangan Agroforestry
2. Perlunya tenaga terampil dalam mengelola agribisnis yang berskala regional
3. Perlunya dibentuk perwakilan dagang di luar daerah pada setiap daerah pengembangan kawasan agropolitan
4. Perlunya pengadaan lembaga perwakilan perbankan yang dapat menyalurkan kredit KKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. *Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan*. Pedoman Umum. Rumusan Hasil Koordinasi antar Departemen Terkait.
- Anonim. 2002. *Dukungan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Pengembangan Kawasan Agropolitan*. Makalah Sosialisasi Agropolitan Tingkat Nasional 10 September 2002. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. DepDaGri.
- Anonim. 2002. *Kebijakan, Strategi dan Program kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi*. Makalah Sosialisasi Agropolitan Tingkat Nasional 10 September 2002. Direktorat Jendral Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Anonim. 2002. *Penyediaan Prasarana dan Sarana dalam Mendukung Pengembangan Program Agropolitan*. Makalah Sosialisasi Agropolitan Tingkat Nasional 10 September 2002. Direktorat Jendral Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Anonim. 2003. *Arah dan Fasilitasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Bidang KIMPRASWIL Untuk Mendukung Kawasan Agropolitan*. Makalah Sarasehan Nasional Agropolitan. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Anonim. 2004. *Program Sektor Pertanian dalam Mempercepat Pembangunan Kawasan Agropolitan*. Makalah Seminar Nasional Pengembangan Agropolitan. Departemen Pertanian.
- Anwar, Afendi. 1999. *Mobilisasi Sumberdaya Ekonomi dalam mengatasi Masalah Pengangguran ke arah Pemerataan yang Menyumbang kepada Pertumbuhan Ekonomi*. PWD-PPs IPB
- Nasoetion, Lutfi Ibrahim. 1999. *Pendekatan Agropolitan dalam Rangka Penerapan Pembangunan Wilayah Perdesaan*. PWD - PPs IPB.
- <http://www.deptan.go.id/Agropolitan/lokasi-2.html>. Dikunjungi 16 Desember 2004.
- [http://www.kompas.com/Apa itu Agropolitan.htm](http://www.kompas.com/Apa%20itu%20Agropolitan.htm). Dikunjungi 10 Desember 2004.
- [http://www.kompas.com/Bersolek Menjadi Agropolitan.htm](http://www.kompas.com/Bersolek%20Menjadi%20Agropolitan.htm). Dikunjungi 10 Desember 2004.
- [http://www.kutaitimur.go.id/Agropolitan Sangsaka](http://www.kutaitimur.go.id/Agropolitan%20Sangsaka). Dikunjungi 10 Desember 2004.
- [http://www.tokohindonesia.com/Meniti Karier dari Lapangan,Tawarkan Agropolitan](http://www.tokohindonesia.com/Meniti%20Karier%20dari%20Lapangan,Tawarkan%20Agropolitan). Dikunjungi 10 Desember 2004.
- <http://www.unmul.ac.id/dat/pub/frontir/husainie>. Dikunjungi 16 Desember 2004.